



# OTT Haryadi Diduga Terkait Suap

■ RIZKYAN ADIYUDHA,  
SILVY DIAN SETIAWAN

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan wali kota Yogyakarta periode 2017-2022, Haryadi Suyuti. Penangkapan tersebut diduga terkait kasus suap.

"Benar kami hari ini telah melakukan giat penangkapan di Jakarta dan Yogyakarta berkaitan dugaan penyuapan," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, di Jakarta, Kamis (2/6). Hingga berita ini diturunkan, tim KPK belum memerinci kasus suap apa yang menjerat politikus PDI Perjuangan itu.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, tim satuan tugas bukan hanya mengamankan mantan wali kota yang baru sepekan melepas jabatannya. Ada beberapa pihak lain yang turut ditangkap. KPK mengamankan pula sejumlah uang dolar yang jumlahnya masih dihitung.

Ketua KPK Firli Bahuri juga belum bisa menjelaskan secara perinci OTT dimaksud. "KPK terus

bekerja untuk upaya-upaya pemberantasan korupsi. Saat ini, KPK sedang melakukan tangkap tangan di wilayah Yogyakarta," kata Firli.

Masyarakat diminta untuk bersabar terkait konstruksi perkara kasus yang menjerat kepala daerah tersebut. "Sampai saat ini, rekan-rekan kami masih bekerja dan tolong diberikan waktu untuk menuntaskannya. Pada saatnya nanti KPK akan menyampaikan ke publik," kata Fikri lagi, Kamis malam.

Lembaga antirasuah itu kini memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang dituduh dalam OTT. Dari Yogyakarta dilaporkan, KPK menyegel ruang kerja wali kota Yogyakarta di Kompleks Balai Kota Yogyakarta.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi saat dikonfirmasi mengatakan, sebelum melakukan penyegelan, sejumlah petugas KPK sempat menemuinya di Balai Kota Yogyakarta sekitar pukul 13.00 WIB. Sumadi baru menjabat menggantikan Haryadi sejak 22 Mei 2022.

Setibanya di ruang kerja, ka-

tanya, ada tiga petugas KPK yang menunjukkan identitas serta surat tugas untuk melakukan penyegelan terhadap ruang kerja wali kota Yogyakarta tersebut. "Setelah saya rapat dari Pemda DIY, saya ke Balai Kota, dan saya mau mulai kegiatan jam 13.00 WIB karena ada rapat. Tapi, ada petugas dari KPK kemudian menunjukkan identitas dan minta penyegelan di ruangan wali kota," kata Sumadi saat dikonfirmasi.

Sumadi tidak menjelaskan lebih lanjut keterangan yang dimuat dalam surat tugas itu. "Itu sekitar jam 13.00 WIB, beliau datang menunjukkan surat tugas dan itu saja. Penyegelan di ruang kerja wali kota, langsung saya tinggal itu," ujarnya.

Sumadi mengatakan, dia tidak dimintai keterangan oleh petugas KPK. Sumadi juga tidak menyaksikan proses penyegelan ruang kerja wali kota oleh KPK.

"Saya tidak lihat penyegelan, saya juga tidak diminta keterangan. Saya tidak tahu lagi karena rapat sampai sore," jelas Sumadi.

■ ed: indira rezkisari

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005